

Analisis Teori Actors

By Muhammad Fadeli

Analisis Teori ACTORS Peran Perempuan PGRI Jawa Timur dalam Pemberdayaan Masyarakat

Muhammad Fadeli¹⁾ Lailatul Musyarofah²⁾

¹⁾Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Ubhara Surabaya
Jl. Ahmad Yani 114 Surabaya

²⁾Prodi Bahasa Inggris STKIP PGRI Sidoarjo
Jl. Kemiri-Sidoarjo

¹⁾cakdeli@Ubhara.ac.id , ²⁾ibulaila7810@gmail.com

ABSTRAK

Badan Khusus Perempuan PGRI adalah salah satu Badan Pelengkap Organisasi yang ada pada PGRI pada setiap level mulai Cabang, Kabupaten, Provinsi, dan Pengurus Besar. Visi Badan Khusus ini adalah untuk memberdayakan perempuan PGRI melalui kegiatan peningkatan kemampuan dan keahlian. Sebagai organisasi pemberdayaan, penting untuk mengetahui tingkat *authority* (wewenang), *confidence and competence* (rasa percaya diri dan kemampuan), *trust* (keyakinan) *opportunities* (kesempatan), *responsibilities* (tanggung jawab), dan *support* (dukungan) yang dimiliki oleh perempuan PGRI. Untuk itu penelitian ini menganalisis ke enam aspek dalam teori ACTORS pada perempuan PGRI dan peran mereka dalam upaya pemberdayaan masyarakat. ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dimana subjek penelitiannya adalah pengurus Badan Khusus Perempuan PGRI 33 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur dimana masing-masing Kabupaten/Kota diambil dua sehingga jumlah totalnya adalah 66. Instrumen yang digunakan untuk menggali data adalah kuesioner dan interview. Temuan yang didapatkan adalah bahwa tingkat keberdayaan perempuan PGRI Jawa Timur dari enam aspek teori ACTORS sudah tinggi. Disamping itu, keterlibatan perempuan PGRI dalam pemberdayaan masyarakat melalui organisasi/komunitas pemberdayaan sudah baik. Rekomendasi untuk penelitian yang akan datang adalah mengadakan penelitian yang ditujukan kepada perempuan yang bekerja pada sektor industri atau ibu rumah tangga yang bekerja di rumah sehingga hasil yang didapat bisa diteruskan pada pihak terkait untuk ditindak lanjuti. Hal ini akan menumbuhkan kesadaran kearah kemandirian sehingga memiliki pemahaman tentang pemberdayaan diri (self empowring)

Kata Kunci: Perempuan PGRI, Pemberdayaan Masyarakat, Teori ACTORS

Abstract

The PGRI Women Board is one of the Organizational Supplementary Bodies that exist at PGRI at every level starting from the Branch, Regency, Province, and Executive Board. The vision of this Special Agency is to empower PGRI women through capacity building and expertise. As an empowerment organization, it is important to know the level of authority, confidence and competence, trust, opportunities, responsibilities, and support owned by PGRI women. For this reason, this study analyzes the six aspects of ACTORS theory in PGRI women and their role in community empowerment efforts. This is a qualitative descriptive study in which the research subjects are the administrators of the

PGRI Women Board in 33 Regencies/Cities in East Java where two districts/cities are taken from each so that the total number is 66. The instruments used to collect data were questionnaires and interviews. The findings obtained are that the level of empowerment of PGRI East Java women from the six aspects of ACTORS theory is already high. In addition, the involvement of PGRI women in community empowerment through empowerment organizations/communities has been good. It recommend for future research are to conduct research aimed at women who work in the industrial sector or housewives who work at home so that the results obtained a recommendation for related parties to follow up. This will foster awareness towards independence so that they have an understanding of self-empowerment

Keywords: PGRI Women, Society Empowerment, ACTORS Theory

A. LATAR BELAKANG

Sejarah mencatat konsistensi perjuangan Raden Ajeng Kartini pada abad ke-18 untuk kesetaraan dalam mendapatkan gelar pahlawan nasional dari pemerintah. Pendidikan Kartini bagi perempuan adat sangat menginspirasi karena Kartini melihat perempuan adat berada dalam status sosial yang rendah. Persidangan Kartini dalam surat-suratnya dalam karya sastra, terang datang dari kegelapan, adalah bukti sejarah bagaimana Kartini berusaha melawan subordinasi laki-laki. Perempuan hanya berperan sebagai pelayan suami, mengurus anak dan rumah tangga lainnya. Melalui kegiatan tersebut, keinginannya mengubah situasi perempuan Indonesia di awal abad ke-20. (Hartutik, 2015). Surat-surat Kartini tidak hanya berbicara tentang emansipasi, tetapi juga tentang masalah sosial. Perjuangan Kartini untuk perempuan mencakup kesetaraan, otonomi, dan kesetaraan hukum

Persamaan meraih hak dalam gender sudah diperjuangkan dari era Kartini, namun perjuangannya belum selesai. Karena ketidakadilan gender masih terakomodasi dalam ranah peraturan dan kebijakan. Bahkan era reformasi juga memberikan ruang bagi munculnya konservatisme berbasis agama

dan puritanisme yang melakukan pembatasan terhadap gerak perempuan. Kecenderungan Negara memfasilitasi kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan lewat peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok marginal (Perempuan, 2004). Dalam banyak kasus Perbedaan gender memunculkan ketidakadilan isu-isu seperti marginalisasi, subordinasi, *stereotyping* citra negatif perempuan, kekerasan (*violence*), beban kerja ganda (*multiburden*) dan ideologi, nilai budaya yang bias gender. Kekerasan pada perempuan terjadi karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender. Ketimpangan gender merupakan perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat, hal ini menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. “Hak istimewa” yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena termasuk dengan cara kekerasan. Jika kesetaraan gender berlaku dimasyarakat maka akan tumbuh apa yang kita sebut “keadilan gender (*gender equality*)”, yang merupakan suatu kondisi dan perlakuan keadilan terhadap perempuan dan laki-laki (Hartutik, 2015)

Asumsi bahwa kemandirian sosial, ekonomi dan politik perempuan mampu meningkatkan posisi tawar mereka masih perlu dipertanyakan. Sebab, kontribusi intelektual bahkan politik perempuan tidak selalu berimplikasi langsung pada relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki. Bentuk kemandirian yang dimaksud adalah kemandirian dalam melakukan urusan sosial dan ekonomi. Kemerdekaan ini berimplikasi pada berbagai kegiatan. Faktor pembentuk kemandirian perempuan adalah wanita yang menjadi seorang ibu, faktor utama yang membentuk kemandiriannya adalah konsepsi dan menyusui anak (Success & Family, 2003). Peran ganda seorang wanita multi-tasking, selain mengurus kebutuhan keluarga, juga mencari nafkah. Kedua pekerjaan penting ini dilakukan secara bersamaan. Di tengah pandemi COVID-19, resesi ekonomi keluarga “memaksa” ibu berperan ganda. Jika setiap hari perempuan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, kini peran ganda dilakukan yaitu selain mengasuh anak, membantu suaminya memenuhi kebutuhan ekonomi.

Terkait dengan sistem nilai dalam masyarakat secara luas, ideologi gender tetap kuat dalam menentukan peran dan status perempuan dalam berbagai aktivitas, baik intra maupun antar keluarga. Salah satu penyebab peran perempuan di ranah domestik adalah budaya patriarki yang didominasi laki-laki. Budaya patriarki yang membedakan laki-laki dan perempuan mengakibatkan adanya pembagian kerja sosial dalam masyarakat (Nimrah dan Sakaria, Rabbits, & Patriarchal Culture, 2015). Patriarki adalah cara pandang yang meminggirkan perempuan; dianggap sebagai warga negara kedua. Budaya patriarki dapat

melanggengkan cara pandang masyarakat dan negara yang mensubordinasi perempuan bahkan melemahkan posisi tawar mereka

Persepsi yang dikaitkan dengan perempuan adalah peran kedua setelah laki-laki. Persepsi ini jelas memiliki jalur penilaian, cenderung kepada masyarakat kelas dua yang seharusnya merasa betah dan ditaburi konsumerisme dan hedonisme dalam pergolakan kapitalisme (Nimrah dan Sakaria et al., 2015). Memang kodrat wanita hamil dan melahirkan tidak kalah terhormat dari gelar apapun. Kontribusi perempuan terhadap lahirnya bangsa yang berkualitas merupakan peran penting di luar karir apapun. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, keterbukaan arus informasi telah memberikan peluang bagi perempuan untuk memasuki sektor publik. Kehadiran perempuan harus memberikan kontribusi positif di berbagai bidang. Aksi kolektif oleh perempuan merupakan salah satu metode gerakan perempuan yang ingin melakukan tuntutan di ranah publik namun tetap mengusung identitas gender perempuan (Women, 2004). Kehadiran perempuan di sektor ekonomi dan politik mutlak diperlukan. Kemandirian ekonomi dan politik perempuan akan meminimalkan subordinasi peran dan fungsi. Keraguan terhadap peran perempuan dalam dunia ekonomi dan politik harus dijawab dengan komitmen perempuan untuk bertanggung jawab.

Pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui modal sosial, modal manusia, modal fisik dan kemampuan pelaku. Hal ini akan dapat memberikan jalan keluar, karena dapat menambah penjelasan bahwa proses pemberdayaan perempuan mutlak diperlukan untuk mencapai keberdayaan masyarakat. (Widjajanti, 2011). Secara

konseptual pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Pencerminan paradigma baru tersebut adalah bersifat *people centered* (berpusat pada manusia), *participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan), dan *sustainable* (berkelanjutan) (Habib, 2021).

Badan Khusus Perempuan PGRI adalah salah satu badan pelengkap organisasi yang terdiri dari perempuan-perempuan PGRI yang bekerja sebagai tenaga pendidik atau tenaga kependidikan dari level PAUD, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, dan Perguruan Tinggi (jika dalam Kabupaten/Kota tersebut ada perguruan tinggi). Badan Khusus Perempuan PGRI kemudian disingkat menjadi BKP PGRI yang ada di level Kecamatan (Cabang), Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional (Pengurus Besar). Ada lima bidang yang menjadi concerns BKP PGRI yakni Bidang Program dan Organisasi, Bidang Riset dan Pengembangan, Bidang Pendidikan, Sosial, dan Budaya, Bidang Pelayanan Kemasyarakatan, Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Usaha. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh BKP PGRI dilakukan di tingkat Cabang dan Kabupaten karena langsung bersentuhan dengan anggota PGRI. Sedangkan kepengurusan pada tingkat Provinsi dan Pengurus Besar lebih bersifat koordinatif. Masa bakti BKP PGRI disesuaikan dengan kepengurusan organisasi PGRI pada masing-masing level. Meski belum genap satu dekade, BKP PGRI mulai bergerak untuk pemberdayaan internal yakni meningkatkan kompetensi perempuan PGRI.

Sebagai pengurus BKP PGRI yang idealnya mampu memberdayakan perempuan PGRI di sekitarnya, maka

perlu untuk mengetahui profil pengurus BKP PGRI Kabupaten/Kota berdasarkan teori ACTORS sehingga diketahui bagaimana tingkat keberdayaan mereka. Sebagaimana tagline BKP PGRI adalah perempuan harus berdaya terlebih dahulu sebelum memberdayakan. Dengan mengetahui profil pengurus BKP PGRI diharapkan arah dan program lanjutan agar tepat sasaran. Kajian pengelolaan pemberdayaan perempuan dengan menggunakan kerangka kerja “ACTORS” menumbuhkan kesadaran, rasa percaya diri, semangat, keyakinan, kesempatan, tanggung jawab, dukungan, inisiatif, dan kreativitas, untuk merubah keadaan kearah kemandirian, sehingga memiliki pengetahuan dan wawasan untuk memberdayakan dirinya (*self-empowering*) secara keberlanjutan (Maani 2011)

B. LANDASAN TEORITIS

Konsep pemberdayaan merupakan hasil interaksi pada tataran ideologis dan praktis. Pada tataran ideologis, konsep ini merupakan hasil interaksi antara konsep top-down dan bottom-up, antara strategi pertumbuhan dan strategi yang berpusat pada rakyat. Sedangkan pada tataran praktis, interaksi terjadi melalui perebutan otonomi. Oleh karena itu, konsep pemberdayaan mengandung konteks penyesuaian diri dengan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Memperhatikan uraian teori-teori pembangunan arus utama, dapat disimpulkan bahwa perekonomian nasional, di mana rakyat (individu dan masyarakat) harus menjadi subjek pembangunan. Tes empiris menunjukkan bahwa teori yang mendukung peran masyarakat luas lebih berhasil dalam pembangunan di negara berkembang. Teori yang hanya mengandalkan modal

dan sumber daya alam sudah ketinggalan zaman. Di sisi lain, teori yang berpusat pada manusia semakin unggul dan semakin sulit untuk dikembangkan, salah satunya adalah teori ACTORS (Macaulay, 1997).

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat di Indonesia, terdapat tiga hal yang perlu dilakukan melalui teori ACTORS. Yaitu pertama, pembangunan harus diarahkan pada perubahan struktural. Kedua, pembangunan bertujuan memberdayakan masyarakat untuk memecahkan masalah ketimpangan berupa pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan dengan memberikan ruang dan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ketiga, pembangunan harus diarahkan pada koordinasi.

Upaya penguatan masyarakat dapat dilihat sebagai berikut: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang; Kedua, peningkatan kapasitas pembangunan masyarakat melalui berbagai dukungan finansial, pelatihan, infrastruktur dan pengembangan sarana, baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah; Ketiga, melindungi yang rentan atau memihak mereka untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keyakinan ini harus diperkuat dan dipupuk melalui usaha yang sungguh-sungguh. Kerangka pemberdayaan dapat dikenal dengan singkatan "ACTORS".

antara lain terdiri dari:

A = *authority* (wewenang) adalah bagaimana mengubah kepercayaan dan kewenangan serta semangat (etos kerja) menjadi milik sendiri.

C = *confidence and competence* (rasa percaya diri dan kemampuan) adalah bagaimana mengubah keadaan dengan melihat kemampuan dan rasa percaya diri.

T = *trust* (keyakinan) adalah bagaimana mengubah diri sendiri dan orang lain melalui keyakinan atas potensi diri sendiri.

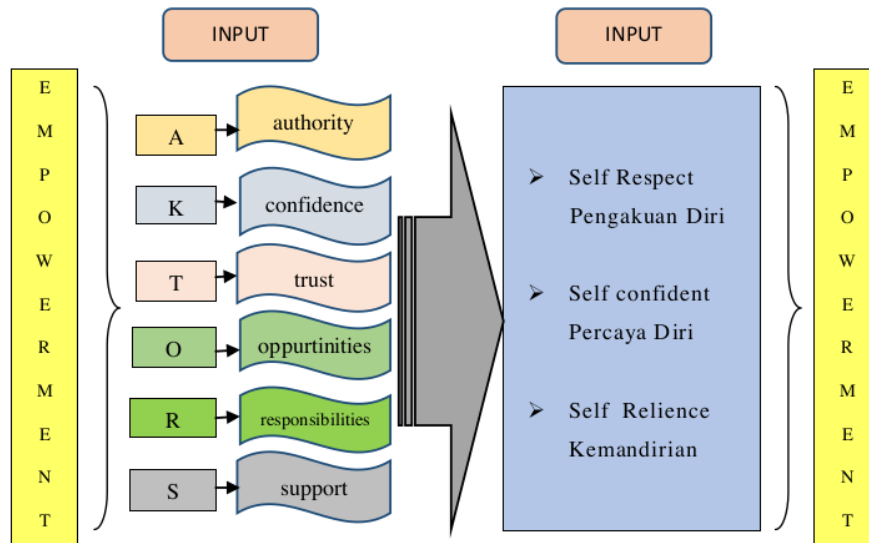
O = *opportunities* (kesempatan) adalah bagaimana mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada dalam diri sehingga terbuka kesempatan sesuai keinginan.

R = *responsibilities* (tanggung jawab) adalah proses perubahan menjadi lebih baik yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab melalui tata kelola yang tepat.

S = *support* (dukungan) adalah dukungan dari berbagai pihak dari sisi ekonomis, sosial dan budaya juga dukungan dari berbagai *stakeholders* (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) yang dilakukan secara simultan tanpa didominasi oleh salah satu pihak/faktor.

Kerangka Teori "ACTORS" tentang pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka kerja Teori ACTORS



Sarah Cook & Steve Macaulay. 1997

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang menurut Auerbach & Silverstein, 2003 (Sugiyono, 2018:3) bertujuan untuk menemukan makna suatu fenomena melalui analisis dan tafsir teks dan wawancara. Penelitian kualitatif dilakukan dengan membandingkan dan memberikan informasi yang kredibel yang dapat diperoleh (Moleong, 1993). Untuk mengetahui profil perempuan PGRI Jawa Timur, maka subjek penelitiannya adalah pengurus Badan Khusus Perempuan PGRI Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang berjumlah 66 dengan rincian, masing-masing Kabupaten/Kota dipilih dua pengurus. Sejauh ini, masih 33 Kabupaten/Kota yang mempunyai Badan Khusus Perempuan PGRI. Adapun instrumen yang digunakan berupa kuesioner yang disebarluaskan melalui Grup WA 'Perempuan PGRI Se-Jawa Timur'.

Kuesioner ini diberikan untuk mengetahui bagaimana profil perempuan PGRI jika dianalisis menurut teori ACTORS. Disamping itu, wawancara juga dilakukan kepada sampel yang bertujuan untuk mengkonfirmasi hasil dari kuesioner dan menambahkan data.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam pembahasan ini dijelaskan bagaimana persepsi dari perempuan PGRI Jawa Timur dalam menilai diri mereka sendiri terhadap enam aspek Teori ACTORS. Selanjutnya dibahas juga dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat. Bahwa dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan penilaian dari berbagai sudut pandang. Melalui Teori ACTORS akan terlihat rekam jejak perempuan PGRI dalam menjalankan perannya dimasyarakat.

A. Analisis ACTORS Perempuan PGRI

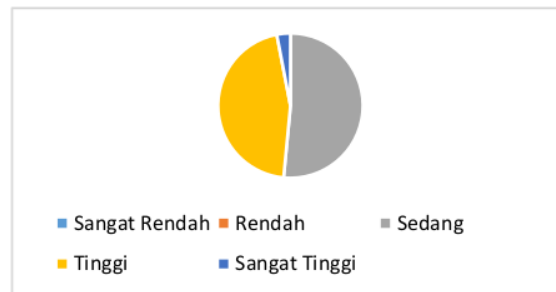
Analisis ACTORS disajikan secara kronologis dengan urutan *authority* (wewenang), *confidence and competence* (rasa percaya diri dan kemampuan), *trust* (keyakinan) *opportunities* (kesempatan), *responsibilities* (tanggung jawab), dan *support* (dukungan).

a. Authority (Kewenangan)

Authority adalah kepercayaan dan kewenangan yang dimiliki oleh pengurus

BKP PGRI untuk mengubah pendirian atau semangat (etos kerja) di tempat kerja dan organisasi serasa milik sendiri. Dalam kuesioner ditanyakan “Seberapa tinggi kepercayaan dan kewenangan yang Anda miliki dalam mengubah pendirian dan semangat kerja dalam organisasi dan tempat kerja?” Berikut adalah jawaban dari informan.

Bagan 1: Aspek Kewenangan pada Perempuan PGRI



Sumber : Diolah peneliti, 2022

Pada Bagan di atas diketahui bahwa 34 menjawab sedang, 30 menjawab tinggi, dan 2 menjawab sangat tinggi. Tidak ada yang memilih sangat rendah dan rendah. Ini bisa dimaklumi karena sebagian besar pengurus BKP PGRI Kabupaten/Kota telah memiliki jabatan dalam tempat kerjanya baik sebagai Kepala Sekolah atau Pengawas sehingga mereka memiliki tingkat kewenangan yang tinggi. Prosesntasi kewenangan perempuan PGRI menunjukkan bahwa tingkat keberdayaannya tinggi, hal ini sangat linier dengan perannya di dalam organisasi maupun di masyarakat. Peran perempuan PGRI mampu berkontribusi atas kebijakan-kebijakan publik dalam mendorong perubahan-perubahan lebih baik. Dalam hal ini kehadiran perempuan PGRI sangat dibutuhkan untuk mendorong perubahan, melakukan sinergi dan

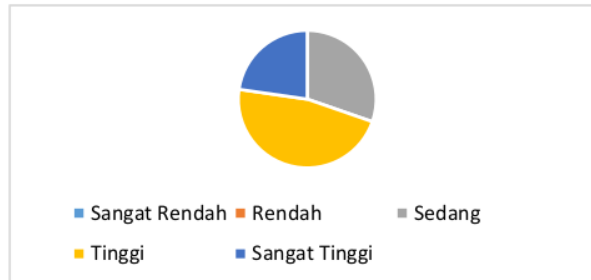
pemberdayaan kepada masyarakat. dengan kewenangan yang dimiliki oleh perempuan PGRI sangat berpeluang menjadi *agent of change*. Peran perempuan dalam perubahan industri inovasi digital menjadi peluang meningkatkan peran dan kapasitas perempuan di berbagai bidang. Peran perempuan menjadi *agent of change* di dalam dunia digital adalah menciptakan konten positif, mengurangi hoaks, penipuan daring, perjudian online, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian serta radikalisme.

b. Confidence and Competence (Kepercayaan Diri dan Kemampuan)

Untuk mengukur *confidence and competence*, ditanyakan dalam kuesioner “Seberapa tinggi rasa percaya diri Anda

dalam mengubah keadaan di tempat kerja dan organisasi untuk menjadi lebih baik?"

Bagan 2: Aspek Kepercayaan Diri dan Kemampuan pada Perempuan PGRI



Sumber : Diolah peneliti, 2022

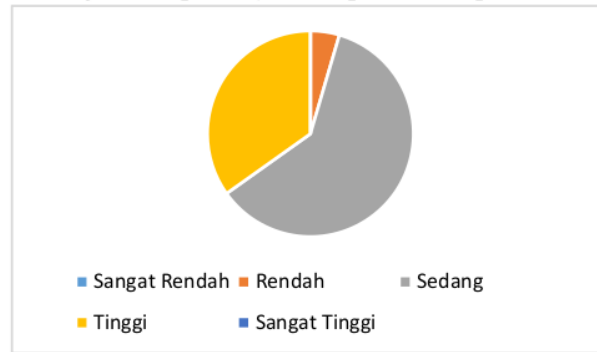
Pada Bagan di atas diketahui 20 menjawab sedang, 31 menjawab tinggi, 15 menjawab sangat tinggi. Profil Pengurus BKP PGRI rata-rata di atas 45 tahun sehingga dengan usia tersebut telah mempunyai pengalaman yang cukup untuk menempa kepercayaan diri dalam tempat kerja dan organisasi. Kepercayaan diri seorang perempuan dibutuhkan untuk mengambil peran di masyarakat. Adanya subordinasi kepada perempuan akan mengecilkan perannya. Tumbuhnya kepercayaan diri perempuan PGRI disebabkan oleh dukungan lingkungan organisasi, pengalaman berkecimpung dalam organisasi PGRI telah banyak memberikan stimulasi atas kepercayaan diri. Faktor penting menumbuhkan kepercayaan diri perempuan adalah dapat menunjang kesuksesan dalam tiap lini kehidupan; entah di pekerjaan, studi, pergaulan sosial, hingga hubungan asmara. Namun sayangnya, tidak semua perempuan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Bahkan, banyak di antaranya yang sering merasa malu

dan takut bahwa kegagalan akan menghampiri. Perlunya dukungan dari pihak luar diri perempuan atau *feedback* positif dari orang disekitar. Feedback atas prestasi, kelebihan dan kualitas perempuan akan membantu dalam pencapaian *goals* dan meningkatkan kepercayaan diri. Pengalaman dan kepercayaan yang diperoleh perempuan PGRI dapat menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan diri. Semakin tinggi kepercayaan diri maka dapat menunjang perannya didalam organisasi maupun di masyarakat.

c. *Trust* (Keyakinan)

Trust adalah keyakinan atas potensi untuk mengubah diri sendiri dan orang lain. Untuk mengetahui tingkat keyakinan tersebut, ditanyakan "Seberapa tinggi tingkat keyakinan Anda atas potensi dalam mengubah diri sendiri dan orang lain dalam lingkup tempat kerja dan organisasi?"

Bagan 3: Aspek Keyakinan pada Perempuan PGRI



Sumber : Diolah peneliti, 2022

Dari Bagan di atas diketahui bahwa tingkat keyakinan pengurus BKP PGRI Kabupaten/Kota adalah 3 untuk rendah, 40 untuk sedang, dan 23 untuk tinggi. Sangat rendah dan sangat tinggi 0. Karena temuan ini menarik, maka wawancara dilakukan pada beberapa informan untuk mengetahui alasan mereka kenapa memilih rendah. Alasannya adalah keyakinan untuk mengubah orang lain merupakan sesuatu yang sulit jika tidak dimulai dari mengubah diri sendiri. Alasan lainnya adalah untuk mengetahui perubahan seseorang karena diri kita agak sulit. Bisa jadi seseorang berubah seperti yang kita harapkan namun bukan karena intervensi dari kita.

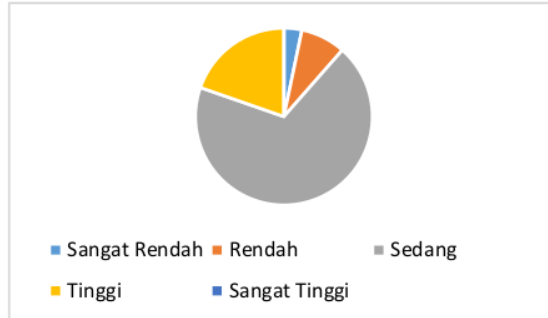
Aspek keyakinan yang diukur tidak sesederhana seberapa yakin perempuan PGRI pada kapasitas diri sendiri melainkan seberapa yakin perempuan PGRI untuk mengubah orang lain sesuai definisi yang ada pada teori

ACTORS. Dari wawancara yang dilakukan bisa ditemukan bahwa keyakinan pada perempuan PGRI relatif sedang dengan alasan yang logis karena mengukur perubahan seseorang tidak semudah mengukur kemampuan seseorang dalam satu bidang. Ketidak yakinan ini juga muncul karena mengubah diri sendiri saja kadang berat apalagi mengubah orang lain. Ditambah lagi jika ada kemungkinan perubahan orang lain bisa terbaca karena sangat signifikan, faktor perubahannya bisa jadi bukan berasal dari diri kita melainkan orang lain atau faktor lain.

d. Opportunities (Kesempatan)

Opportunities merupakan kesempatan untuk memilih keinginan sehingga dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi diri baik dalam dunia kerja maupun organisasi. Hasilnya ditunjukkan dalam Bagan di bawah ini.

Bagan 4: Aspek Kesempatan dalam Persepsi Perempuan PGRI



Sumber : Diolah peneliti, 2022

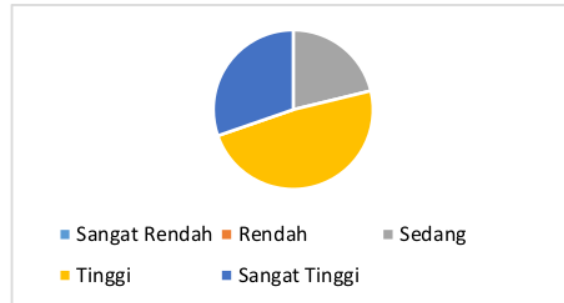
Dari Bagan di atas diketahui yang memilih rendah 2, sedang 42, tinggi 5, sangat tinggi 0. Dari wawancara, diketahui bahwa informan yang memilih rendah karena sudah bukan masanya untuk memilih keinginan pribadi dan mengembangkan potensi diri sendiri. Kesempatan itu terbuka bagi generasi yang lebih muda, dan mereka yang harusnya membuka kesempatan tersebut. Alasan lain mengapa memilih rendah karena kesempatan untuk memilih keinginan sesuai dengan potensi diri tidak di dapat dari dunia kerja atau organisasi karena potensi tersebut tidak berhubungan langsung dengan dunia kerja dan organisasi. Dukungan terhadap agar perempuan mampu mendesain kebijakan yang dapat memungkinkan perempuan untuk terus produktif, berkapasitas dan

berkarya. Perempuan harus mampu membuktikan bahwasanya keberadaannya layak untuk diperhitungkan. Kecerdasan serta kepiawaian perempuan-perempuan Indonesia, tidak bisa lagi dianggap remeh karena telah turut berkontribusi terhadap pembangunan. Kesempatan perempuan misalnya perempuan harus memiliki *skill* yang setara dengan laki-laki, memperbaiki keterampilan dan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan untuk perempuan, dan menguatkan implementasi kebijakan tenaga kerja yang mengakomodasi kesetaraan gender.

e. Responsibilities (Tanggung Jawab)

Responsibilities adalah tanggung jawab dalam proses perubahan menjadi lebih baik melalui tata kelola yang tepat

Bagan 5: Aspek Tanggung Jawab pada Perempuan PGRI



Sumber : Diolah peneliti, 2022

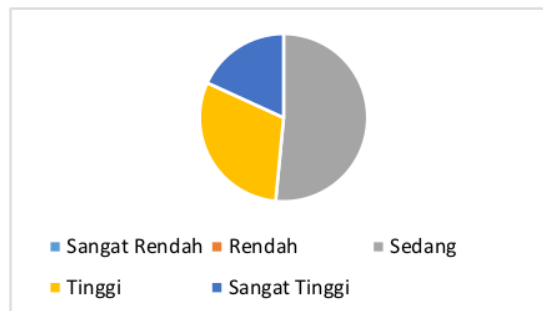
Bagan di atas menunjukkan bahwa sangat rendah dan rendah 0, sedang 14, tinggi 32, sangat tinggi 20. Ini menunjukkan bahwa tingkat tanggung jawab pengurus BKP PGRI Kabupaten/Kota sudah tinggi mengingat latar belakang jabatan yang mereka emban memang pada level penanggung jawab. Sebagai makhluk sosial perempuan dihadapkan dengan kondisi yang menuntut adanya sikap tanggung jawab pada setiap perannya. Ciri dari manusia yang berbudaya adalah memiliki rasa tanggung jawab. Tanggung jawab akan mulai tampak dikala manusia sudah menyadari atas perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dilakukan. Karena itu tanggung jawab adalah sikap yang sangat penting dan harus dimiliki dan diterapkan oleh

perempuan dalam melaksanakan perannya. Melalui perilaku sikap tanggung jawab, begi seorang perempuan maka dapat dihargai disegani oleh orang lain. Sikap tanggungjawab perempuan PGRI dalam menjakankan organisasi maupun profesinya merupakan bagian dari kinerja institusi. Tanggung jawab merupakan sikap yang ditunjukkan perempuan PGRI terhadap apa yang telah menjadi tanggungjawabnya merupakan komitmen individu dalam setiap aktifitas.

f. Support (Dukungan)

Support adalah dukungan dari berbagai pihak secara seimbang baik dari sisi ekonomis, sosial dan budaya juga dukungan dari berbagai *stakeholders* (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) yang dilakukan secara simultan.

Bagan 6: Aspek Dukungan pada Perempuan PGRI



Sumber : Diolah peneliti, 2022

Bagan di atas menunjukkan bahwa tidak ada yang memilih sangat rendah dan rendah. Sedangkan yang memilih sedang sebanyak 34, tinggi sebanyak 20, sangat tinggi sebanyak 12. Ini menunjukkan support yang diberikan *stake holders* sudah baik. Menariknya, dari hasil wawancara, dukungan dari teman sejawat baik di dunia kerja maupun organisasi yang belum optimal. Terutama dalam organisasi, dominasi kaum pria masih dirasakan pada pembagian bidang kerja. Salah satu contohnya adalah pengurus perempuan selalu diletakkan pada jabatan bendahara atau seksi konsumsi dalam kepanitiaan. Dukungan teman sejawat merupakan faktor penting dalam peningkatan peran perempuan PGRI baik dalam organisasi maupun profesi. Dukungan sesama kolega mampu menjadi penyemangat, motivasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

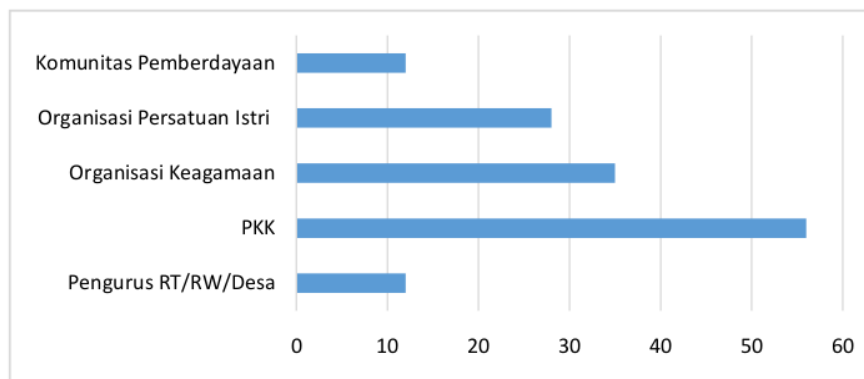
B. Peran Perempuan PGRI dalam Pemberdayaan Masyarakat

Peran perempuan PGRI dalam pemberdayaan masyarakat diukur melalui keterlibatan mereka dalam organisasi atau komunitas pemberdayaan masyarakat dan peran mereka dalam organisasi tersebut.

a. Keterlibatan dalam Organisasi

Perempuan hadir sesuai karakteristiknya pada sektor publik dapat mewarnai dan berkontribusi pada penyelesaian problem di masyarakat. Untuk mengetahui peran perempuan PGRI dalam pemberdayaan masyarakat, keterlibatan perempuan PGRI dalam organisasi atau komunitas pemberdayaan masyarakat dibagikan melalui kuesioner. Kuesioner ini diikuti oleh wawancara dari sampel yang dipilih berdasarkan jawaban pada kuesioner yang perlu ditindak lanjuti. Berikut adalah grafik yang menunjukkan keterlibatan perempuan PGRI dalam organisasi atau komunitas pemberdayaan masyarakat.

Grafik 1: Peran Perempuan PGRI dalam Organisasi/Komunitas Pemberdayaan Masyarakat



Sumber : Diolah peneliti, 2022

Dari grafik di atas, diketahui bahwa perempuan PGRI aktif terlibat dalam beberapa organisasi atau komunitas sekaligus. PKK adalah organisasi yang menjadi pilihan terbanyak bagi perempuan

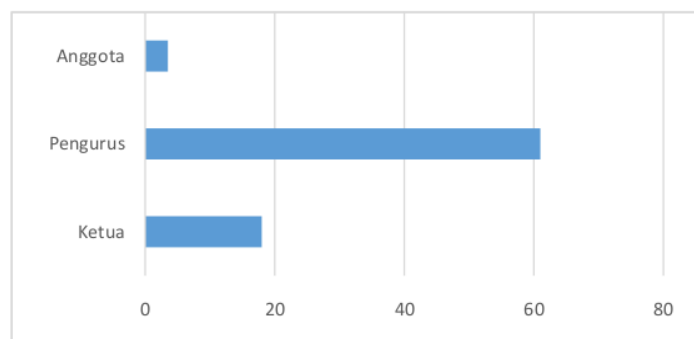
PGRI dalam memberdayakan masyarakat melalui kegiatan-kegiatannya diikuti oleh organisasi keagamaan, organisasi persatuan istri, dan terakhir sebagai pengurus RT/RW/Desa. Dalam menindak

lanjuti hasil kuesioner yang telah diperoleh, pertanyaan terkait program atau kegiatan apa yang telah mereka lakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui organisasi yang mereka ikuti adalah berupa seminar, pelatihan, bantuan sosial, dan pendampingan kegiatan ekonomi.

b. Peran dalam Organisasi

Peran perempuan dalam organisasi (selain PGRI) dan komunitas pemberdayaan masyarakat dilihat dari fungsi mereka dalam pengambilan keputusan. Untuk itu, peran mereka sebagai ketua, pengurus, atau anggota digali melalui kuesioner.

Grafik 2: Peran Perempuan PGRI dalam Organisasi/Komunitas Pemberdayaan Masyarakat



Sumber : Diolah peneliti, 2022

Dari grafik di atas diketahui dari beberapa organisasi yang diikuti perempuan PGRI, 62 perempuan adalah pengurus organisasi/ komunitas pemberdayaan masyarakat, 18 sebagai ketua, dan 5 orang yang sebagai anggota. Ini membuktikan bahwa peran perempuan PGRI dalam organisasi sudah sangat tinggi sehingga fungsi mereka dalam upaya pemberdayaan masyarakat diharapkan juga kontributif.

Kontribusi perempuan PGRI dalam Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam manajemen organisasi maupun peran di masyarakat. Kegiatan partisipasi perempuan, tidak hanya sebagai perpanjangan dari tugasnya dalam pekerjaan reproduktif, tetapi bertujuan untuk membuat perempuan

mampu memiliki peran produktif. Perempuan dapat memberikan sumbangan pemikiran juga partisipasi aktif dalam sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peran perempuan PGRI dalam pemberdayaan masyarakat pada ranah domestik mampu meningkatkan keahlian di dalam rumah tangga. Sedangkan pada ranah publik mampu memberikan kontribusi positif atas peningkatan kualitas organisasi. Peran organisasi perempuan PGRI sudah menunjukkan ke arah pembangunan sosial dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan budaya. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan. Pembangunan di bidang pendidikan oleh organisasi

perempuan PGRI dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi, dakwah, pemberian kursus keterampilan-keterampilan.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

a. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi perempuan PGRI melalui teori ACTORS dan untuk mengetahui bagaimana peran perempuan PGRI dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui kuesioner dan wawancara, diketahui bahwa tingkat keberdayaan perempuan PGRI Jawa Timur ditinjau dari aspek ACTORS sudah tinggi dan peran mereka dalam pemberdayaan masyarakat juga dinilai sudah baik dilihat dari keterlibatan mereka dalam organisasi atau komunitas pemberdayaan masyarakat dan peran mereka dalam organisasi tersebut. Dengan menggunakan kerangka teori ACTORS maka dapat terlihat bagaimana peran perempuan PGRI dalam pemberdayaan masyarakat hal ini akan menumbuhkan kesadaran kearah kemandirian sehingga memiliki pemahaman tentang pemberdayaan diri (self empowering)

b. Rekomendasi

Penelitian ini dilakukan kepada pengurus BKP PGRI Kabupaten/Kota dimana mereka telah mempunyai latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan organisasi yang baik. Maka tidak mengherankan jika temuan yang didapat adalah semua aspek dalam ACTORS rata-rata tinggi. Di samping itu, peran mereka dalam pemberdayaan masyarakat sekitar juga cukup tinggi. Untuk ke depan, disarankan untuk mengadakan penelitian yang ditujukan kepada perempuan yang

bekerja pada sektor industri atau yang memilih sebagai ibu rumah tangga yang bekerja di rumah sehingga hasil yang didapat bisa diteruskan dan ditindak lanjuti.

REFERENSI

- Hartutik. (2015). R.A. Kartini : Emansipator Indonesia Awal Abad 20. *Jurnal Seuneubok Lada*, 2(1), 86–
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif. *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 106–134.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2012). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP)*. 1–52.
- Kesuksesan, M., & Keluarga, U. (2003). *PERANAN KEMANDIRIAN WANITA DALAM MENDUKUNG KESUKSESAN USAHA KELUARGA Oleh : Basukiyatno ABSTRAK*.
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 55.
- KiaiTanjung (2017) *Jagat Kiai Tanjung*, Jatayu Pomosda Nganjuk
- Maani, Karjuni Dt (2011). Teori ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal DEMOKRASI* Vol. X No. 1
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nimrah dan Sakaria, S., Kunci, K., & Budaya Patriarki, dan. (2015). *Perempuan Dan Budaya Patriarki*

- Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014). *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), 2407–9138.
- Perempuan, C. J. (2004). *Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia*. 4–5.
- Prantiasih, A. (2014). Reposisi Peran dan Fungsi Perempuan. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 27(1), 1–6.
- RAHMAHARYATI, A., WIBHAWA, B., & NURWATI, N. (2017). Peran Ganda Buruh Perempuan Sektor Industri Dalam Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 230–234.
- Saputra, H. A., Mutiarin, D., & Nurmandi, A. (2020). Analisis Wacana Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia Tahun 2018 - 2019. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 110(August), 89–110.
- Sarah Cook & Steve Macaulay. 1997. *Perfect Empowerment*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretif interaktif dan konstruktif*
- Utami, S. (2019). An Nisa ' Jurnal Studi Gender dan Anak Eksistensi Perempuan di Era Digitalisasi. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 12(1), 596–609.
- Widjajanti, K. (2011). *Jurnal Ekonomi Pembangunan Model pemberdayaan masyarakat*. 12.
- Yuspita Widiyaningrum, W. (2020). Partisipasi Politik Kader Perempuan dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 4(2), 126–142.

Analisis Teori Actors

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

★ejournal.unesa.ac.id

Internet

2%

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF

EXCLUDE SOURCES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF